

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Dengan terlaksananya proses persiapan dan pemindahan Ibu Kota, maka sudah jelas bahwa agenda pemerintah untuk beberapa tahun mendatang akan berfokus pada kegiatan tersebut. Perlu diketahui bahwa pada saat penulisan ini, rencana pemerintah dalam proses pemindahan Ibu Kota diresmikan sejak 18 Januari 2022 dengan disahkannya Undang-undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Sedangkan kegiatan persiapan dan pemindahan dimulai pada saat *groundbreaking* yaitu pada 21-22 September 2023. Maka proses pembangunan telah berjalan selama delapan bulan 14 hari semenjak peletakkan batu pertama. Selama rentang waktu tersebut, pembangunan di Kalimantan Timur dilakukan tanpa henti untuk mengejar sasaran pembangunan, dimana salah satunya memuat kegiatan peringatan Dirgahayu Republik Indonesia ke-79 di Ibu Kota Nusantara. Berdasarkan konsep perencanaan Ibu Kota yang mengusung konsep kota hutan, berbagai macam prinsip dan pendekatan yang dimuat dalam dokumen-dokumen pemerintah sudah menjadikan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai tulang punggung rancangan besar pemerintah dalam proses pembangunan Ibu Kota. Namun, perlu diketahui bahwa pelaksanaan di lapangan seringkali tidak mengindahkan kebijakan yang dibuat untuk melindungi baik lingkungan maupun proses pembangunan itu sendiri. Perlunya peningkatan kesadaran bahwa rencana yang baik, jika tidak diawasi, akan dieksekusi secara kurang baik. Maka oleh itu, sebagai masyarakat pemerhati, konsep-konsep hijau yang mendukung kelestarian alam tidak bisa hanya diterima sebagai bahan label komersial dalam mempromosikan program agenda pemerintah, dalam hal ini, pembangunan Ibu Kota. Penekanan terhadap jujur perencanaan dan penerapan menjadi sangat bagi masyarakat maupun pemerintah dalam mengusung konsep pembangunan berkelanjutan.

Setelah mendalami secara keseluruhan rencana pemerintah terhadap negara Indonesia, dimulai dari Pemindahan Ibu Kota Hingga Peninjauan terkait Forest City. Penelitian ini menarik kesimpulan terkait dengan Pemindahan Ibu Kota perlu untuk diperhatikan lebih mendalam terutama dampak yang bisa terjadi terhadap daerah yang dituju sebagai Ibu Kota yang baru. Sebagaimana penjabaran dalam Bab II terkait hal tersebut, jawaban pemerintah dirasa kurang untuk bisa memberikan ketenangan bagi masyarakat, pemerintah hanya menjabarkan sisi positif dari pemindahan dan terkesan tidak mengindahkan opini dari

masyarakat. Walaupun setelahnya didapati maksud pemerintah mengatakan bahwa Undang-Undang IKN telah disahkan adalah karena penjaminan perlindungan bagi masyarakat sebenarnya sudah diatur secara detail dalam peraturan tersebut, namun penyampaian akan hal ini masih kurang. Kekurangan penyuluhan terkait dengan hal ini sebenarnya bisa berdampak negatif karena seharusnya pemerintah bersifat terbuka.

Selanjutnya terkait dengan solusi yang diberikan oleh pemerintah yakni penerapan Konsep Forest City untuk mewujudkan keberlanjutan Indonesia Prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan bukti bahwa masyarakat global menyadari dampak dari aktivitas manusia dan keinginan mereka untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berbagai macam konferensi dan pertemuan internasional diadakan dan tiap kali manusia sudah dekat dengan sebuah solusi yang muncul dari hasil perundingan selalu muncul tantangan baru lainnya. Meski demikian hal tersebut tidak serta merta membuat masalah dunia khususnya di bidang lingkungan, seketika saat muncul solusi dalam bentuk perjanjian, menjadi hilang dan terselesaikan. Masyarakat dunia telah menjalani perjalanan panjang yang penuh dengan jatuh bangun dan pembelajaran dari kesalahan hingga mereka tiba pada suatu Kesimpulan berupa Pembangunan Berkelanjutan. Meski sifatnya mendesak, dunia global seringkali mengesampingkan kepentingan lingkungan dengan dalih bahwa kegiatan ekonomi mereka dapat terganggu, namun demikian, banyak negara-negara mulai menyadari kegentingan dari permasalahan tersebut.

Hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana, meski derap Langkah setiap negara dalam menerapkan Pembangunan berkelanjutan berbeda, niat dan tujuan dari setiap negara untuk menciptakan lingkungan dunia yang lebih baik tetaplah merupakan tanggung jawab bersama-sama. Jika tidak dimaknai seperti itu, maka tentunya kerusakan lingkungan, cepat atau lambat, akan memengaruhi negara lain di bumi ini dan dampaknya akan bertahan dalam waktu yang lama. Berbicara mengenai derap Langkah setiap negara, dunia internasional mengharapkan bahwa setiap negara memaknai prinsip Pembangunan berkelanjutan dalam bentuk hukum dan kebijakan yang mengikat Masyarakat nya masing-masing. Hal ini diwujudkan di Indonesia dengan berkembangnya hukum lingkungan dan pembahasan terkait Pembangunan berkelanjutan khususnya akhir-akhir ini dengan adanya megaprojek pemerintah dalam persiapan dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Meskipun aturan dan kebijakan yang keluar terkait lingkungan dan Ibu Kota Nusantara sudah ada dan bersifat menyeluruh, namun lingkup ruang yang dinaungi oleh hukum

lingkungan masih belum luas, ditambah dengan kurangnya peraturan penegakkan hukum lingkungan. Sebagai anggota Masyarakat kita perlu memahami kontribusi kita dalam menjalankan hukum dapat berupa ragam bentuk, salah satunya adalah bentuk pengawasan terhadap pemerintah. Sejauh ini, memang pemerintah sudah menjalankan tanggung jawab mereka dalam mendirikan simbol negara yang mendukung Pembangunan berkelanjutan di Indonesia dalam bentuk Ibu Kota Nusantara yang baru. Namun perjalanan tersebut tidak tanpa tantangan yang memerlukan kontribusi tidak hanya bagi pemangku kepentingan, tapi juga kita semua sebagai Masyarakat Indonesia. Karena pada akhirnya, manfaat dari penerapan Pembangunan berkelanjutan ini tidak hanya kita nikmati sekarang, tetapi juga bagi generasi Masyarakat Indonesia dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

A.G. Pamungkas, Standar Perencanaan Pembangunan Wilayah Berbasis Ekosistem Hutan Tropis Mendukung Pembangunan IKN, STANDAR: Better Standar Better Living {jurnal KLHK}, Vol. 1 No. 2(2022), artikel lengkap tersedia di <https://majalah.bsilhk.menlhk.go.id/index.php/STANDAR/article/view/24/18>

Architecture 2030 (2017) Why The Built Environment?, Architecture 2030. Available at: <https://www.architecture2030.org/why-the-built-environment/> (Accessed: 02 June 2024).

Ayundari (2022) Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara. Available at: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html> (Accessed: 01 June 2024).

Aziz SR, A. (2023a) ‘Pemindahan Ibu Kota Negara Perspektif Civil Society’, Journal of Politics and Policy, 5(2), pp. 104–118. doi: 10.21776/ub.jppol.2023.005.02.03.

Bappenas (2020) Literasi, SDGs Indonesia. Available at: <https://sdgs.bappenas.go.id/literasi/> (Accessed: 28 May 2024).

BUKU AJAR: METODE PENELITIAN HUKUM. (2020). (n.p.): SCOPINDO MEDIA PUSTAKA. hlm. 20

Chintia (2022) Mengapa IKN Harus Pindah Ke Kaltim?, Website Portal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Available at: <https://www.kaltimprov.go.id/berita/mengapa-ikn-harus-pindah-ke-kaltim> (Accessed: 28 March 2024).

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2013) Millenium Development Goals (MDGs), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Available at: <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/kamus/file/kamus-46.pdf> (Accessed: 28 May 2024).

Farisa, F.C. (2022) Pemindahan Ibu Kota Negara: Gagasan Soekarno, Mimpi Soeharto, Dan Upaya Jokowi Halaman all, KOMPAS.com. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/02/21161811/pemindahan-ibu-kota-negara-gagasan-soekarno-mimpi-soeharto-dan-upaya-jokowi?page=all> (Accessed: 01 June 2024).

Farisa, F.C. (2022a) Alasan Jokowi pindahkan ibu kota Negara: Pemerataan Ekonomi Hingga Populasi Halaman all, KOMPAS.com. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/01/20232691/alasan-jokowi-pindahkan-ibu-kota-negara-pemerataan-ekonomi-hingga-populasi?page=all> (Accessed: 02 June 2024).

Fong, R. (2023) JB Forest City ‘ghost town’ works halted due to pandemic, developers claim they’ve resumed, Must Share News - Independent News for Singaporeans. Available at: <https://mustsharenews.com/forest-city-development-resumed/> (Diakses: 12 June 2023).

Forest City: Liuzhou (2023) Stefano Boeri Architetti. Available at: <https://www.stefanoboeriarchitetti.net/en/project/liuzhou-forest-city/> (Diakses: 27 June 2023).

Hamdani, T. (2022) 6 Sumber Modal Proyek IKN di Kaltim, detikfinance. Available at: <https://finance.detik.com/properti/d-6024762/6-sumber-modal-proyek-ikn-di-kaltim> (Accessed: 29 May 2024).

Hartono, Sunaryati. 2006. PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.

Ika, A. (2022) 6 Alasan Ibu Kota Negara Pindah Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur Halaman all, KOMPAS.com. Tersedia di: <https://money.kompas.com/read/2022/02/11/052456426/6-alasan-ibu-kota-negara-pindah-dari-jakarta-ke-kalimantan-timur?page=all> (Diakses: 12 June 2023).

Jiwa Muda Indonesia (2022) IKN Forest City Concept. Tersedia di: <https://www.jiwamudaindo.com/ikn-forest-city-concept/> (Diakses: 12 June 2023).

Keeble, Brian R. (1988). 'The Brundtland report: 'Our common future''. *Medicine and War*. 4 (1): 17–25

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2021. "Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara". Jakarta. BAPPENAS.

Kementerian PPN / Bappenas (2019) 'Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur'. Jakarta: Kementerian PPN / Bappenas. Diakses pada 16 November 2023

Kementerian PPN / Bappenas. 2023. "Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 2045". Jakarta: Kementerian PPN / Bappenas.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2022. Rencana Induk IKN dalam Lampiran UU IKN. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalimantan Timur. 39 hal.

Kementrian Keuangan, K.P.B.U.– K.P.D.B.U. (no date) Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, KPBU. KPBU Kemenkeu Republik Indonesia. Tersedia di: <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1150-1404/umum/kajian-opini-publik/ibu-kota-negara-baru-integrasi-infrastruktur-dan-kelestarian-alam> (Diakses: February 9, 2023).

Kencana, M.R.B. (2022) Temuan KPA: Lahan IKN Nusantara Bukan Tanah Negara, liputan6.com. Available at: https://www.liputan6.com/bisnis/read/4910795/temuan-kpa-lahan-ikn-nusantara-bukan-tanah-negara?page=2#google_vignette (Accessed: 30 May 2024).

Kencana, Maulandy Rizky Bayu (2022) Ada Sinar Mas, proyek IKN Disinyalir Jadi Ajang Bisnis Skala Besar, liputan6.com. Available at: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4910883/ada-sinar-mas-proyek-ikn-disinyalir-jadi-ajang-bisnis-skala-besar> (Accessed: 30 May 2024).

Laia, K. (2022). *Walhi sebut Banyak Dampak Merugikan, Jelang Pengesahan RUU IKN*. Betahita. Tersedia di: <https://betahita.id/news/detail/7031/jelang-pengesahan-ruu-ikn-walhi-sebut-banyak-dampak-merugikan.html?v=1642630868> (Diakses: 12 June 2023).

Lampiran II Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

Mitra, R. (2016) 'Sustainability and Sustainable Development', *The International Encyclopedia of Organizational Communication*, pp. 1–10. doi:10.1002/9781118955567.wbieoc201. (Diakses: 24 Juni 2023)

Mousourakis, George. (2019). Some Methodological Issues in Comparative Law. DOI: 10.1007/978-3-030-28281-3_5.

Nurdin, S. (2022) M. Tri Andika: Investor IKN Kabur Karena Tak Ada Garansi Politik, Viva.co.id. Available at: <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1458036-m-tri-andika-investor-ikn-kabur-karena-tak-ada-garansi-politik> (Accessed: 29 May 2024).

Nurhanisah, Y. (2022) 5 Alasan Pindah Ibu Kota Negara: Indonesia Baik, indonesiabaik. Available at: <https://indonesiabaik.id/infografis/5-alasan-pindah-ibu-kota-negara> (Accessed: 02 June 2024).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964 Tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta

Perpres No.111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Prabowo, D. (2022) Ungkap Konsep smart Forest City IKN, Jokowi: 70 Persen Area Hijau, 80 persen transportasi publik, KOMPAS.com. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/15053061/ungkap-konsep-smart-forest-city-ikn-jokowi-70-persen-area-hijau-80-persen> (Diakses: 29 May 2023).

Pratama, W.P. (2022) Setop Proyek IKN, INDEF: Opsi Tepat Untuk Amankan APBN, Bisnis.com. Available at: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220314/10/1510193/setop-proyek-ikn-indef-opsi-tepat-untuk-amankan-apbn> (Accessed: 30 May 2024).

Purnama, S.J. and Chotib (2022a) ‘ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA’, Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, pp. 154–166. Hlm 160. doi:10.22212/jekp.v13i1.2155.

Raharjo, D.B. (2022) Walhi Ungkap 3 Dampak Lingkungan Serious Akibat Pemindahan Ibu Kota Ke kalimantan, suara.com. Tersedia di: <https://www.suara.com/news/2022/01/19/123032/walhi-ungkap-3-dampak-lingkungan-serius-akibat-pemindahan-ibu-kota-ke-kalimantan> (Diakses: 13 June 2023).

Ramos, J. (2022) Forest cities: Nature conquers the heart of cities, Tomorrow.City. Tomorrow.City. Tersedia di: <https://tomorrow.city/a/forest-cities-nature-conquers-the-heart-of-cities#:~:text=Forest%20city%20is%20the%20term,part%20of%20modern%20urban%20trends.> (Diakses: April 9, 2023).

Rijal, S. (2022) Peluang dan Ancaman, Tentang Budaya Paser di IKN nusantara (1), kaltimpost.id. Tersedia di: <https://kaltimpost.jawapos.com/kolom-pembaca/12/08/2022/peluang-dan-ancaman-tentang-budaya-paser-di-ikn-nusantara-1> (Diakses: 25 May 2023).

Rukmana, D. (no date) ‘Pemindahan Ibukota Negara’. <https://berkas.dpr.go.id/sipinter/files/sipinter-391-749-20200706213210.pdf>.

SK, I. (2023) Mengapa Ibu kota negara harus pindah?, detiknews. Available at: <https://news.detik.com/kolom/d-6781027/mengapa-ibu-kota-negara-harus-pindah> (Accessed: 02 June 2024).

Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkunga Hidup

Undang-undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara

Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UNDP. 2017. Sustainable Development Goals-Sustainable Cities and Communities. United Nations Development Programme. Available at: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals/sustainable-cities-and-communities> (Accessed: 28 May 2024).

Walhi (2023) Ibu Kota negara baru Untuk Siapa, Publik Atau Elit? WALHI. Available at: <https://www.walhi.or.id/ibu-kota-negara-baru-untuk-siapa-publik-atau-elit> (Accessed: 30 May 2024).

Warlina, L. (2023) 'PWKL4409 – Manajemen Pembangunan dan Lingkungan (Edisi 2)'. Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka. Dapat diakses di [<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PWKL4409-M1.pdf>]

World Commission on Environment and Development (1987) Brundtland Report. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. Available at: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf> (Accessed: 28 May 2024)